

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PENGELOLAAN WISATA PANTAI OLEH BADAN USAHA MILIK
DESA TENGGAYUN KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA
KABUPATEN BENGKALIS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Fitra Mahendri
NPM : 137110037

PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU
2019

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Skripsi yang berjudul “Pengelolaan Wisata Pantai Oleh Badan Usaha Milik Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis” ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaiannya skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan hal itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :

1. Bapak Rektor UIR Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.
2. Bapak Dr.H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Bapak Hendry Andri S.Sos, M.si selaku ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Drs. Parjiana, M.Si selaku dosen pembimbing I yang dengan sabar membantu dan mengarahkan dalam penulisan usulan penelitian ini.
5. Ibuk Evi Zubaidah, S.Sos., I, MPA selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, petunjuk dan motivasi demi kelancaran proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh staff Tata Usaha yang telah memberikan tunjuk ajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Buat kedua orang tua yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dorongan, yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik anaknya dengan pengorbanan yang tiada tara baik materi maupun non materi, semoga ilmu yang diperoleh anaknya bermanfaat dan membahagiakan bapak dan mamak, serta terimakasih buat adik yang selalu mendukung proses penulisan ini.
8. Kepada Erig Rinanda, Azhar, Misbahul, M. Nuzul Amri, Sugiono Indra, AP A 2013, dan teman-temanku yang telah banyak memberikan dukungan untuk kelancaran penyelesaian proposal ini, saya ucapkan terimakasih, semoga kita sukses dimasa depan.

9. Buat Feni Latuconsina terimakasih sudah selalu ada untuk menemani saya dari proses awal membuat skripsi ini sampai selesai.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini, maka untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi nusa dan bangsa, Amin.

Pekanbaru, 05 November 2019

Penulis,

Fitra Mahendri

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan penulisan dan Kegunaan Penulisan.....	18
1. Tujuan Penelitian.....	18
2. Kegunaan Penelitian.....	18
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	19
A. Studi Kepustakaan.....	19
1. Konsep Administrasi.....	19
2. Konsep Organisasi.....	22
3. Konsep Manajemen.....	23
4. Konsep Pengelolaan.....	24
5. Konsep Desa.....	28
B. Kerangka Pikir.....	31
C. Konsep Operasional.....	31
D. Operasional Variabel.....	32
E. Teknik Pengukuran.....	34

BAB III : METODE PENELITIAN	37
A. Tipe Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Populasi dan Sampel.....	37
1. Populasi.....	37
2. Sampel	38
D. Teknik Penarikan Sampel.....	39
E. Jenis dan Sumber Data	39
F. Teknik Pengumpulan Data	39
G. Teknik Analisis Data	40
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	41
A. Sejarah Singkat Desa Tenggayun	41
B. Visi dan Misi	43
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Identitas Responden	48
1. Jenis Kelamin Responden Penelitian	48
2. Usia Respoden	48
3. Tingkat Pendidikan Responden	49
B. Pengelolaan Wisata Pantai Oleh Badan Usaha Milik Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis	50
1. Perencanaan	51
2. Pengorganisasian	55
3. Pengarahan	59
4. Pengawasan	62
BAB VI :KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II. 2 : Oprasional Variabel	33
Tabel III. 1 : Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Bagaimanakah Pengelolaan Wisata Pantai Oleh Badan Usaha Milik Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis	38
Tabel IV. 1 : Jumlah Penduduk	41
Tabel IV. 2 : Mata Pencarian masyarakat	42
Tabel V. 1 : Keadaan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	48
Tabel V.2 : Keadaan Responden Berdasarkan Kelompok Usia	49
Tabel V.3 : Keadaan Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan ..	50
Tabel V.4 : Distribusi Jawaban Responden (Pedagang dan Masyarakat) Terhadap Indikator Perencanaan	52
Tabel V.5 : Analisis Distribusi Responden (Pegawai dan Masyarakat) terhadap indikator Perencanaan	53
Tabel V.6 : Distribusi Jawaban Responden (Pedagang dan Masyarakat) Terhadap Indikator Pengorganisasian	56
Tabel V.7 : Analisis Distribusi Responden (Pegawai dan Masyarakat) terhadap indikator Pengorganisasian	57
Tabel V.8 : Distribusi Jawaban Responden (Pedagang dan Masyarakat) Terhadap Indikator Pengarahan	59
Tabel V.9 : Analisis Distribusi Responden (Pegawai dan Masyarakat) terhadap indikator Pengarahan	60
Tabel V.10 : Distribusi Jawaban Responden (Pedagang dan Masyarakat) Terhadap Indikator Pengawasan	63

Tabel V.11	: Analisis Distribusi Responden (Pegawai dan Masyarakat) terhadap indikator Pengawasan	64
Tabel V.12	: Rekapitulasi Jawaban Kepala Desa, Ketua BUMDes, Sekretaris BUMDes dan masyarakat	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II. I	: Kerangka Pikir Tentang Pengelolaan Wisata Pantai Oleh Badan Usaha Milik Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis	31



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Daftar Wawancara Penelitian
2. Daftar Kuisisioner Penelitian
3. Jawaban Wawancara Penelitian
4. Photo Dokumen Hasil Observasi Penelitian
5. Rekapitulasi Telly Kuisisioner
6. SK Dekan Fisipol Nomor : 406/Fs-UIR/Kpts/2017 Tentang penetapan dosen pembimbing
7. Surat Keputusan Dekan FISIPOL UIR nomor : 801/ UIR-FS/KPTS/2018, tentang Penetapan pergantian Dosen Pembimbing
8. Surat Mohon Rekomendasi Riset Nomor :570/E-UIR/27-FS/2019
9. SK Dekan Fisipol Nomor : 406/Fs-UIR/Kpts/2017 Tentang penetapan dosen pembimbing
10. Surat Rekomendasi Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN=RISET/23527 dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, Perihal Izin Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi
11. Surat Rekomendasi Nomor :061/DPMPSP-TU/VI/2019/282 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis
12. Surat Rekomendasi Nomer : 420/Pelum/VI/2019/126 Kecamatan Bandar Laksamana
13. Surat Rekomendasi Nomor : 140/TGN-KU/04 Desa Tenggayun

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konprehensif usulan penelitian yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fitra Mahendri
NPM : 137110037
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pengelolaan Wisata Pantai Oleh Badan Usaha Milik Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Usulan Penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Usulan Penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 05 November 2019
Pelaku Pernyataan

Fitra Mahendri



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

PENGELOLAAN WISATA PANTAI OLEH BADAN USAHA MILIK DESA

TENGGAYUN KECAMATAN BANDAR LAKSMANA KABUPATEN

BENGGALIS

ABSTRAK

Fitra Mahendri

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan wisata pantai desa Tenggayun yang dikelola oleh badan usaha milik desa Tenggayun. Dimana, diukur dengan empat indikator yaitu: Perencanaan merupakan aktifitas atau kegiatan yang ditentukan secara bersama sebelum kegiatan itu dimulai, Pengorganisasian merupakan aktifitas menentukan tugas dari masing-masing individu atau sekelompok orang agar terlaksananya kegiatan yang telah disepakati bersama, Pengarahan merupakan kewenangan terhadap bawahannya agar diikuti baik secara lisan maupun tulisan dan Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang agar tercapainya kinerja yang diinginkan. Tipe penelitian yang berlokasi di desa Tenggayun ini adalah Deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya mengenai objek penelitian yang diteliti dengan memprioritaskan alat bantu kuisioner untuk mengetahui nilai variabel, serta dengan menggunakan metode penelitian Kuantitatif. Terdapat tiga kelompok populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu kepala desa, ketua badan usaha milik desa dan sekretaris badan usaha milik desa Tenggayun yang berjumlah 3 orang serta masyarakat setempat dan pengunjung wisata pantai Tenggayun berjumlah 61 orang. Dan keseluruhan populasi dan sampel tersebut dijadikan sampel dimana kepala desa Tenggayun adalah sebagai Key Informant dan teknik penarikan sampel yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah sensus dan purposive sampling. Jenis dan teknik pengumpulan data yang terdiri dari data primer yang dikumpulkan dengan teknik kuisioner dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Sementara teknik analisis data yang dipergunakan adalah teknik deskriptif. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa pengelolaan wisata pantai oleh badan usaha milik desa Tenggayun dikatakan cukup berhasil, karena kurang rapinya tata letak warung pedagang, minimnya pengetahuan para petugas dalam melayani wisatawan, kurangnya ketegasan terhadap petugas yang tidak menjalankan tugasnya, serta kurangnya pengawasan terhadap pengunjung, maka dari itu wisata pantai desa Tenggayun masih sangat memerlukan pembenahan sumber daya manusia, dan pembangunan yang memadai.

Kata Kunci : Pengelolaan, Wisata Pantai

BEACH TOURISM MANAGEMENT BY THE BUSINESS AGENCY OWNED

TENGGAYUN VILLAGE, BANDAR LAKSAMANA DISTRICT, BENGKALIS

REGENCY

ABSTRACT

Fitra Mahendri

This study aims to determine the management of coastal tourism in Tenggayun village, which is managed by a business entity owned by Tenggayun village. Where, measured by four indicators, namely: Planning is an activity or activity determined jointly before the activity begins, Organizing is an activity determining the tasks of each individual or group of people to carry out activities that have been mutually agreed upon, Direction is the authority of subordinates to be followed both orally and in writing and Oversight is an activity carried out by a person or group of people in order to achieve the desired performance. This type of research located in the village of Tenggayun is Descriptive, which is a study that describes the real condition of the research object carefully by prioritizing questionnaire aids to find out the value of variables, and by using quantitative research methods. There are three population groups and samples in this study, namely the village head, the head of the village-owned business entity and the secretary of the Tenggayun village-owned business entity, amounting to 3 people as well as the local community and Tenggayun beach tourism visitors totaling 61 people. And the entire population and sample are sampled where the Tenggayun village head is the Key Informant and the sampling technique used in data collection is census and purposive sampling. Types and data collection techniques consisting of primary data collected by questionnaire and interview techniques as well as secondary data collected using observation and documentation techniques. While the data analysis technique used is descriptive technique. Based on this analysis technique the researchers assessed and concluded that the management of coastal tourism by the Tenggayun village-owned business entity was said to be quite successful, due to the lack of neatness of the layout of the merchant's stalls, the lack of knowledge of the officers in serving tourists, the lack of firmness towards officers who did not carry out their duties, and the lack of supervision to visitors, therefore the Tenggayun village beach tourism still badly needs improvement in human resources, and adequate development.

Keywords: Management, Beach Tourism

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu dan komitmen yang sudah dibuat bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (dalam Syafri, 2012;12). Hal ini sebenarnya sesuai dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menerapkan otonomi daerah sehingga hubungan ada hubungan kerja sama antara pusat dan daerah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dikatakan organisasi sesuai dengan pengertian organisasi yaitu unsur utama bagi kelompok yang bekerja sama mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah (tempat) pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya aktivitas bagi pencapaian tujuan. Dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan wadah bagi seluruh lapisan bangsa untuk menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi yang lebih baik.

Untuk mencapai tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini di butuhkan cara yaitu manajemen, sesuai dengan pengertian manajemen yang berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia membutuhkan pengaturan untuk mewujudkan tujuannya.

Salah satu bentuk manajemen yang di terapkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah. Salah satu substansi dari kandungan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah memberikan otonomi Daerah kepada daerah otonom. Dijelaskan didalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Otonom Daerah adalah “ hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya konsep Otonomi Daerah pemerintah daerah berhak menyelenggarakan system pemerintahan daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah terdiri dari Provinsi dan Kabupaten/kota, dimana Pemerintah Desa ditempatkan pada pemerintahan yang terendah. Jika mengibaratkan sistem pemerintahan nasional sebagai rangkaian mata rantai system pemerintahan mulai dari yang pusat, daerah dan Desa, maka Desa merupakan mata rantai terendah.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau yang disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “ Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintah Daerah diatur dalam undang-undang”. Hal ini berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam system pemerintahan Indonesia.

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas

melalui ketentuan dalam pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Desa yang mempunyai hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan demikian, tujuan ditetapkan pengaturannya Desa dalam Undang-Undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (7) dan pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menjelaskan bahwa:

- 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - b. Mengangkat dan memperhatikan perangkat Desa.

- c. Memegang kekuasaan pengelolaan dan aset Desa.
- d. Menetapkan peraturan Desa.
- e. Menetapkan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.
- n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Desa

berhak :

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa.
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Desa.
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta
- d. Mendapatkan jaminan kesehatan.
- e. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
- f. Memberikan mandate pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa

berkewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Yunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.

- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan Desa.
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa.
- j. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa.
- m. Membina dan melestarikan nilai soial budaya masyarakat Desa.
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 7 tersebut pemerintahan Desa tidak dapat begitu saja membentuk sebuah peraturan Desa untuk menjabarkan peraturan perundang-undangan atau pendelegasian karena urusan atau wewenang asli yang diselenggarakan oleh Desa sangat terbatas. Keterbatasan pemerintah Desa tersebut dihapus dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan keleluasan yang lebih kepada pemerintah Desa dalam menjalankan otomoni Desa.

Didalam peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam pasal 132 dijelaskan :

1. Desa dapat mendirikan BUMDesa.
2. Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.
3. Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi pemerintahan desa.

4. Organisasi pengelola BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas ; a. Penasehat ; dan b. Pelaksana operasional
5. Penasehat dimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat secara exofficio oleh kepala desa.
6. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa
7. Pelaksana operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) dilarang merangkap jabatan yang dilaksanakan fungsi pelaksana lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.

Badan usaha milik desa (BUMDES) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDES menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa (PADesa). Berangkat dari cara pandangan ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDES, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintahan desa memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian BUMDES. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDES harus memiliki perbedaan ekonomi dengan lembaga ekonomi pada umumnya.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDesa harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari pemerintah desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting

untuk mempersiapkan pendirian BUMDes , karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam peraturan daerah (Perda) maupun peraturan Desa (Perdes).

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun dimasyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui peraturan daerah (Perda).

Adapun tujuan dari pendirian BUMDES diantaranya meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan perekonomian pedesaan.

Sementara itu usaha yang dapat dijalankan melalui BUMDES adalah:

1. Pasar
2. Waserda
7. Simpan pinjam
8. Sumber air

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 3. Transportasi | 9. Objek wisata |
| 4. Home industri | 10. Kerajinan rakyat |
| 5. Perikanan darat | 11. Perternakan |
| 6. Pertanian | 12. Agroindustri |

Sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah tujuan pendirian BUMDES antara lain dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa (PADes).

Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa pasal 17 modal BUMDES yaitu:

- 1) Modal awal BUM desa bersumber dari APB desa.
- 2) Modal BUM desa terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal desa; dan
 - b. Penyertaan modal masyarakat desa.

Adapun pasal 24 menyatakan bahwa:

1. BUM desa dapat menjalankan usaha bersama (Holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan perdesaan.
2. Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang di atur dan dikelola secara sinergis oleh BUM desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
3. Unit usaha dalam BUM desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjalankan usaha bersama meliputi:
 - a. Pengembangan kepala desa bersekala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - c. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasiakan jenis usaha lokal lainnya.

Rumusan tentang peraturan Desa ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan kepala Desa atau nama lainnya. Definisi ini juga

yang digunakan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang merupakan pengaturan lebih lanjut tentang Desa.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pengelolaan Kawasan Wisata Skala Desa juga merupakan sumber pendapatan Desa yang sah, artinya pengelolaan Pariwisata di Desa, adalah bentuk dari penambahan sumber pendapatan Desa.

Selanjutnya tugas dan fungsi Kepala Desa ini dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa :

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa dijelaskan dalam Pasal 3, 4, dan 5 kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

Pasal 3 yang menyebutkan bahwa tugas kepala Desa :

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai pelaksana penyelenggara Pemerintah Desa.
2. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Selanjutnya pada pasal 4 menerangkan bahwa kepala Desa bertugas :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Mengajukan rancangan peraturan Desa.
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APD Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- d. Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- f. Membina perekonomian Desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.

- h. Mewakili Desa dalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Sementara itu, pada pasal 5 juga menyebutkan fungsi dan tugas kepala

Desa yaitu :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari kolusi, Korupsi dan nepotisme.
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Desa.
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik.
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa.
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa.
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa.
- l. Mengembangkan pendapatan di Desa.
- m. Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- p. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah Desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwasannya salah satu tugas kepala Desa ialah dalam menyelenggarakan pembangunan Desa, baik dalam mengembangkan masyarakat, maupun mengembangkan potensi dari Desa tersebut.

Pernyataan tersebut sesuai dengan peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 Tentang pengelolaan aset Desa, pasal 1 ayat 1 dan 2 yaitu:

Pada ayat 1, jenis aset Desa terdiri atas:

- a. Kekayaan asli Desa.
- b. Kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa.
- c. Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari
- d. Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis.
- e. perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan Undang undang.
- f. Hasil kerjasama Desa, dan.
- g. Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Sementara itu, pada ayat 2 kekayaan asli Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Tanah kas Desa.
- b. pasar Desa.
- c. pasar hewan.
- d. tambatan perahu.
- e. bangunan Desa.
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa.
- h. pelelangan hasil pertanian.
- i. hutan milik Desa.
- j. mata air milik Desa.
- k. pemandian umum, dan.
- l. lain-lain kekayaan asli Desa.

Selanjutnya berdasarkan peraturan desa Tenggayun Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 tentang tatacara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa Tenggayun sejahtera desa Tenggayun, bab III jenis usaha pasal 7 dijelaskan yakni:

1. Jenis usaha yang dijalankan oleh BUM Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - a. Bisnis social
 - 1) Listrik desa
 - 2) Air minum desa
 - 3) Bisnis lainnya
 - b. Bisnis penyewaan
 - 1) Alat transpormasi

- 2) Perkakas pesta
 - 3) Gedung pertemuan
 - 4) Rumah toko
 - 5) Penyewaan tanah BUM desa
 - 6) Penyewaan lainnya
- c. Bisnis perantara
- 1) Jasa listrik
 - 2) Jasa penitipan barang di pasar desa
 - 3) Jasa pengiriman barang
 - 4) Pasar desa
 - 5) Jasa lainnya
- d. Bisnis perdagangan
- 1) Pabrik
 - 2) Pabrik pengolahan karet
 - 3) Pabrik pengolahan bata
 - 4) Perdagangan jenis lainnya
- e. Bisnis keuangan
- 1) UED-SP
 - 2) Simpan pinjam masyarakat lainnya
- f. Bisnis holding (usaha bersama antar unit dikelola langsung oleh BUM des
- 1) Desa wisata
 - 2) Dan kegiatan usaha bersekala besa lainnya
2. Unit usaha BUM desa yang ada dan yang akan dibentuk
- a. Unit usaha ekonomi desa – simpan pinjam
 - b. Pariwisata
 - c. Pasar desa
 - d. Koperasi Tenggayun mandiri

Dari penjelasan diatas adapun usaha yang dikelola oleh Bumdes diantaranya:

- a. UED-SP
- b. APMS
- c. Desa wisata
- d. Pasar desa

UED-Sp merupakan usaha ekonomi desa simpan pinjam, dimana desa membantu masyarakat yang membutuhkan, dengan tujuan agar masyarakat bias berwirausaha sehingga dengan masyarakat adanya usaha maka bias meningkatkan pendapatan masyarakat tersebut.

Pos APMS merupakan agen premium dan minyak solar, dimana badan usaha milik desa Tenggayun mendirikan pos APMS bertujuan untuk membantu masyarakat dan meningkatkan pendapatan desa, adapun ketersediaan minyak APMS tersebut bersumber dari pembelian di SPBU kota Dumai, kemudian minyak tersebut dijual kepada masyarakat.

Desa wisata merupakan desa memanfaatkan kekayaan milik desa yang dikelola secara langsung untuk membantu masyarakat desa dan sebagai sumber pendapatan desa, serta di desa Tenggayun desa wisata dikelola oleh badan usaha milik desa.

Pasar desa merupakan desa diberi wewenang membentuk suatu wadah, dimana wadah tersebut adanya transaksi jual beli dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Maka yang menjadi fokus penulis dalam melakukan penelitian ini adalah desa wisata, karena desa wisata yang dijalankan oleh badan usaha milik desa di desa Tenggayun masih sangat minimnya fasilitas sebagai penarik minat pengunjung serta desa wisata Tenggayun juga merupakan salah satu program desa Tenggayun, namun sampai saat ini belum ada perkembangan atau pembangunan yang dilakukan oleh badan usaha milik desa Tenggayun, sedangkan desa wisata Tenggayun sangat memerlukan pengembangan untuk ketertarikan pengunjung.

Karena masih belum adanya perkembangan dalam pengelolaan desa wisata Tenggayun maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yakni desa wisata Tenggayun.

Berdasarkan pra survey secara langsung dan data yang penulis dapatkan di lapangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Perikanan dan Kelautan membuat perjanjian kerja nomor : A.04/SPK/PLBPM-BKS/IV/2008. Tentang Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) Desa Tenggayun Kecamatan Bukit Batu.

Berdasarkan Kuasa Pengguna Anggaran Tentang Penetapan Lokasi/Desa Sasaran Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) T.A. 2006 Kabupaten Bengkalis Nomor : 22/PLBPM-BKS/VI/2006 tanggal 23 Juni 2006 telah menunjuk Desa Tenggayun Dan Desa Bantan Air untuk melaksanakan Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) T.A. 2006 Kabupaten Bengkalis Nomor : 23/PLBPM-BKS/VI/2006 tanggal 13 Juli 2006 telah menunjukkan kelompok nelayan Mekar Sari di Desa Tenggayun Kecamatan Bukit Batu dan kelompok nelayan Gombang Belinsang Jaya di Desa Bantan air Kecamatan Bantan sebagai group/kelompok sasaran.

Berdasarkan penjelasan diatas maka adanya kerja sama desa Tenggayun dengan Dinas Perikanan dan Kelautan pada tahun 2006, akan tetapi sejak tahun 2011 kerjasama antara desa Tenggayun dengan Dinas Perikanan dan Kelautan tidak berjalan atau kerjasama tersebut diberhentikan.

Sesuai data yang penulis dapatkan dari program jangka menengah tahun 2014-2020 bidang sarana prasarana, adanya pembangunan MCK di pantai, di sebutkan juga adanya potensi wisata pantai, selanjutnya penulis juga mendapatkan data dari rencana kerja pembangunan Desa (RKP Desa) tahun 2016

pengembangan tempat wisata pantai, dengan tujuan peningkatan ekonomi masyarakat, serta dijelaskan juga berdasarkan analisa pemerintah Desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa, diantaranya kurangnya pengembangan wisata yang telah ada di Desa Tenggayun.

Desa Tenggayun berada pada daerah pesisir yang terletak di daerah laut, sehingga ada potensi pariwisata yang mungkin untuk di kembangkan. Pantai Wisata Tenggayun merupakan salah satu potensi yang dimiliki oleh Desa Tenggayun, selain dari desa wisata yang dapat di kembangkan, Desa Tenggayun juga merupakan jalan lintas Kota Dumai dengan Sungai Pakning, sehingga kemungkinan berkembangnya Desa wisata Tenggayun sangat besar.

Penulis juga telah melakukan pra survei secara langsung ke lapangan baik kepada masyarakat setempat maupun ke instansi terkait. Adapun tanggapan dari masyarakat setempat khususnya penjual yang ada di wisata desa tenggayun mereka sangat berharap pengembangan wisata pantai desa Tenggayun segera dilakukan karena bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dari data yang penulis dapatkan ada terdapat 40 objek wisata yang ada di Kabupaten Bengkalis dan wisata desa Tenggayun termasuk salah satu wisata bahari yang ada di Kabupaten Bengkalis, serta 9 jenis wisata diantaranya wisata alam, wisata sejarah, wisata bahari, wisata ziarah, wisata budaya, wisata iptek, wisata kuliner, wisata rekreasi, dan wisata minat khusus.

Dilaporkan penulis menemukan adanya aspirasi masyarakat, dimana masyarakat menginginkan pembangunan fasilitas diwisata pantai Tenggayun, seperti adanya wahana bermain bagi pengunjung.

Penulis juga menemukan adanya kerjasama antara pemerintah desa dengan dinas perikanan dan kelautan, namun kerjasama tersebut terhenti. Selanjutnya

Penulis juga menemukan bahwa wisata pantai Tenggayun merupakan wisata yang dikelola oleh BUMDes namun pengelolaan wisata pantai Tenggayun belum sesuai dengan yang diharapkan serta tidak adanya upaya pemerintah desa Tenggayun dan BUMDes Tenggayun meminta bantuan kepada Dinas Pariwisata.

Berdasarkan pengamatan awal, penulis melihat fenomena-fenomena yang ada di Desa wisata Tenggayun yaitu :

1. Tidak adanya tanggapan dari Pemerintah Desa yakni badan usaha milik desa dalam menanggapi aspirasi masyarakat untuk mengembangkan Potensi Desa Tenggayun.
2. Terhentinya kerjasama antara wisata pantai desa Tenggayun dengan Dinas Perikanan dan Kelautan.
3. Tidak adanya upaya pemerintah desa dan badan usaha milik desa Tenggayun untuk mengelola sesuai dengan perdes dan Dinas pariwisata terkait pengelolaan wisata pantai desa Tenggayun.

Pengelolaan yang dilakukan oleh badan usaha milik desa Tenggayun dalam hal pengelolaan wisata pantai Tenggayun, penulis merasa masih kurang efektif. Karena masih minimnya wahana bagi pengunjung sehingga pengunjung merasa tidak puas berwisata di wisata pantai Tenggayun dan juga dengan minimnya

fasilitas dan wahana di wisata pantai Tenggayun sehigga wisatawan yang ramai mengunjungi wisata pantai Tenggayun hanya pada hari-hari tertentu saja misalnya seperti hari lebaran, terhentinya kerja sama pemerinta desa Tenggayun dengan dinas Perikanan dan Kelautan karena masih adanya lahan milik masyarakat, serta belum adanya upaya perbaikan yang di lakukan oleh badan usaha milik desa Tenggayun dalam mengembangkan Wisata Pantai Desa Tenggayun padahal Desa Tenggayun mempunyai potensi wisata yang bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan Desa, namun apa yang terjadi dengan Pantai Wisata Tenggayun masih sangat jauh dari harapan.

Berdasarkan Fenomena di atas, maka penulis tertarik memfokuskan penelitian lebih lanjut tentang: **“Pengelolaan Wisata Pantai Oleh Badan Usaha Milik Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang dan fenomena yang penulis kedepankan diatas, maka dapat diambil suatu permasalahan pokok dalam usulan penelitian ini. Adapun masalah yang penulis angkat sebagai berikut : **“Bagaimanakah Pengelolaan Wisata Pantai Oleh Badan Usaha Milik Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis?”**

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menjelaskan Pengelolaan Wisata Pantai Oleh Badan Usaha Milik Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis.

2. Kegunaan Penelitian

- a. **Secara Teoritis yaitu,** Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang peranan dan fungsi kepala desa dalam pengelolaan aset desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
- b. **Secara Praktis yaitu,** Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepala desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis dalam mengembangkan dan menjaga potensi desa sehingga berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat desa Tenggayun.
- c. **Secara Akademis,** yaitu penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan atau bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian pada bidang dan kasus yang sama.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori dalam penelitian, agar dapat diketahui bagaimana hubungan dan dimana posisi dan pengetahuan yang telah ada, perlu adanya ulasan terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dengan topik masalah yang diangkat untuk memungkinkan pembacaan mengingatkan cakrawala dari segi tujuan dan hasil penelitian.

Berdasarkan latar belakang penelitian untuk membahas untuk masalah diperlukan berbagai landasan teori yang dijadikan titik tolak ukuran yang akan dijadikan titik tolak ukuran yang akan dibahas khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan.

1. Konsep Administrasi

Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kemampuan terbatas, maka untuk mengendalikan dan memenuhi kebutuhannya suka atau tidak suka manusia membutuhkan uluran tangan dari lingkungan sekitarnya termasuk manusia lainnya. Pemenuhan kebutuhan manusia juga berkorelasi dengan semakin meningkatnya kualitas dan kualitas kerja yang dihasilkan manusia. Tata tertib, keteraturan, kerjasama kooperatif itu penting bagi peradaban dan bagi usaha mempertahankan hidup bersama. Salah satu cara untuk memelihara mengurus mengendalikan dunia sekitar, demi kesejahteraan ialah administrasi.

Maju mundurnya sebuah bangsa atau negara amat bergantung pada baik buruknya administrasi.

Bear (dalam Lepawsky, 1960) mengatakan tidak ada satu hal dalam abad modern sekarang ini yang lebih penting dari administrasi. Kelangsungan hidup pemerintahan yang beradab dan bahkan kelangsungan hidup peradaban itu sendiri akan sangat tergantung dengan kemampuan kita untuk membina dan mengembangkan suatu filsafat administrasi yang mampu memecahkan masalah-masalah masyarakat modern (dalam Syafri, 2012:3)
Secara *etimologis*, administrasi berasal dari bahasa latin *ad* dan *ministrare*,

yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta *administratio* yang berarti pembantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan”. Di Italia disebut juga *amministrazione*. (dalam Syafri 2012:3).

Administrasi terbagi dua, yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit adalah berupa kegiatan pencatatan, pengelolaan, pengumpulan, pemberian nomor/ kode surat, pengetikan, penggandaan, penyimpanan, (pengarsipan), pengiriman, berbagai informasi yang diterima atau yang dikeluarkan oleh suatu organisasi/ institusi. Sementara administrasi dalam arti luas yakni proses (rangkaiannya) kegiatan usaha kerja sama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. (dalam Syafri, 2012:3-4).

Administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2003:2)

Administrasi (dalam Siagian, 2003:2-3) menurut defenisinya dibagi beberapa hal. Pertama, administrasi sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaannya dan akhirnya tidak diketahui. Kedua, administrasi mempunyai beberapa unsur-unsur tertentu, yaitu adanya dua manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas atau tugas-tugas yang harus dilakukan, adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas empat, itu. Kedalam peralatan dan perlengkapan juga termasuk pula waktu, tempat, perlatan, materi serta sarana lain. Ketiga, bahwa adminitrasi sebagai proses kerja sama bukan merupakan hal yang baru karena telah timbul ber-sama-sama dengan timbulnya peradaban manusia. Tegasnya, administrasi sebagai seni merupakan suatu fenomena sosial.

Menurut Atmosudirjo administrasi merupakan suatu fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi. Jadi, barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu organisasi.

Menurut Nawawi (dalam syafiie, 2003:5) Administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian administrasi sering dibedakan menjadi dua, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas.

Secara terminologi apa yang disebut “Administrasi” adalah mengurus, mengatur, mengelola. Jika dibubuhi oleh awalan pe dan akhiran an pada setiap arti, maka semuanya mengandung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan apalagi pengaturan adalah terciptanya keteraturan dalam susunan dan pengaturan dinamikanya (dalam Alie,2000:19).

Dari uraian penjelasan diatas, maka pentingnya administrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan bersama, dengan itu administrasi haruslah memiliki pengelolaan yang baik.

Dalam hal ini, salah satu bentuk kegiatan administrasi adalah pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh kepala desa dalam membangun dan mensejahterakan desa beserta masyarakatnya.

Maka dari itu, dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka kegiatan administrasi yang dipimpin oleh seseorang yang ditunjuk atau di beri kepercayaan oleh masyarakat untuk memimpin dan membangun organisasi yang lebih baik lagi maka seorang pemimpin harus benar-benar bertanggung jawab atas jabatan yang didudukinya, dengan itu untuk memajukan organisasi yang dipimpinnya, maka seseorang pemimpin harus bisa mengelola sumberdaya yang ada, guna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat atau organisasi yang dipimpinnya.

2. Konsep Organisasi

Konsep organisasi merupakan diaplikasikan setiap aspek studi administrasi. Keberadaan setiap aspek studi administrasi dimaksud untuk memberikan dukungan kepada setiap kebijakan manajerial dan operasional.

Organisasi menurut Siagian (2003:6) adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Gaus (dalam Hamim,2005:13) menyatakan organisasi sebagai tata hubungan antara orang-orang untuk dapat memungkinkan terciptanya tujuan bersama dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada semua anggota organisasi, akan meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas organisasi. Yang mana organisasi memiliki keragaman yang nantinya akan memberikan dampak bagi organisasi tersebut.

Menurut Manulang (dalam Hasibuan, 2009:24) organisasi dalam arti dinamis adalah suatu proses penetapan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan, penetapan tugas-tugas atau tanggung jawab serta wewenang dan hubungan antara unsur-unsur organisasi sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerjasama seefektif mungkin untuk pencapaian tujuan.

Organisasi menurut Waldo (dalam Hamim,2005:13) merupakan struktur hubungan pribadi yang berdasarkan atas wewenang, formal dan kebiasaan dalam suatu sistem administrasi. Rancangan struktur yang baik akan tergambar kegiatan sekaligus monitoring efektivitas dan perhatian terhadap manfaat struktur tersebut.

Organisasi adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama. Organisasi minimal mengandung tiga elemen yang saling berhubungan, yaitu sekelompok orang, interaksi dan kerja sama, dan tujuan bersama (dalam Siswanto,2005:73).

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan perkumpulan atau kelompok orang yang saling bekerja sama dan berinteraksi untuk dapat tujuan bersama. Dalam hal ini, orang yang dimaksud adalah pemerintahan desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis.

3. Konsep Manajemen

Manajemen berasal dari kata kerja (*to manage*) yang berarti menangani, mengendalikan, menguasai, mengurus, menyelesaikan sesuatu. Manajer adalah seseorang yang disertai tugas memimpin dan mengurus suatu tugas, lembaga, usaha dan sebagainya.

Menurut Millet manajemen adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan (dalam Siswanto,2005:1)

Afifudin (2013:2) menerangkan bahwa manajemen merupakan disiplin ilmu yang bertugas mencari kebenaran dalam predikat dimensi teoritis dan metodologi yang harus di uji dan dibuktikan berdasarkan fakta/data secara objektif kebenarannya. Oleh karena itu manajemen sebagai ilmu penting untuk dikembangkan agar didapatkan kebenaran ilmu.

Menurut Siagian (2003) manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi.

Sementara menurut Siswanto (2005:2) manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

Dari penjelasan diatas manajemen diartikan sebagai seni dan ilmu, yaitu seni yang dimaksud sebagai suatu keahlian, kemahiran, kemampuan, dan keterampilan dalam aplikasi ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan, sementara manajemen suatu ilmu ialah akumulasi pengetahuan yang telah disistematiskan dan diorganisasikan untuk mencapai kebenaran umum (*general purpose*) (dalam Siswanto,2005:3)

Menurut Terry (dalam Hamim, 2003:36) manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*, dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian yang diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.

Istilah manajemen telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pembinaaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, administrasi, dan sebagainya.

Di dalam suatu organisasi yaitu desa terdapat beberapa sumber daya yang harus di kelola oleh kepala desa beserta staf jajarannya, guna memajukan dan bermanfaat bagi penduduk desa itu sendiri, sehingga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, sesuai dengan judul penelitian penulis maka manajemen yang baik di dalam pemerintahan desa sangat diperlukan, guna mengelola aset desa berupa wisata pantai yang layak untuk dikembangkan.

4. Konsep Pengelolaan

pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Admosudirjo (2005:160) Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu.

Setiap desa pada umumnya memiliki “asset desa” ,yang dimiliki oleh suatu desa. Yang harus dikelola dengan baik dan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Menurut Cholis (dalam Rauf dan Maulidiah, 2015:241), bahwa ; “pengelolaan kekayaan desa berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akunkabilitas dan kepastian nilai. Pengelolaan kekayaan desa harus berdaya guna dan berhasil untuk meningkatkan pendapatan desa.

Pengelolaan asset desa merupakan sebuah cara ataupun usaha dalam proses ataupun sebuah rangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dimulai dari perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada pengawasan untuk mencapai sebuah tujuan (Risnawati, 2017).

Menurut Moekijat (1989;30) pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan.

Menurut Soekanto (1986;19) pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerakan sampai dengan proses terwujudkan tujuan.

Hal senada dikemukakan oleh Wardoyono bahwa pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian pergerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang di tetapkan sebelumnya.

Menurut Nugroho pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola. (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.

Admosudirjo (2005;160) mendefinisikan bahwa Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu.

Dan pengertian diatas Admosudirjo menitikberatkan pengelolaan pada proses mengendalikan dan memanfaatkan semua faktor sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Dengan demikian, moekijat menitik beratkan pengelolaan pada proses perencanakan, mengorganisasi, menggerakkan, mengawasi utnuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain.

Sedangkan menurut Terry (2009:9) Pengelolaan sama dengan menejemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan.

Adapun fungsi pengelolaan secara garis besar dapat disampaikan bahwa dapat melakukan manajemen meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut bersifat universal dimana saja dan dalam organisasi apa saja. (Terry 2006:3)

Indikator Penilaian

1. Perencanaan (*Planning*)

Menurut Sutrano NS (2004:109), perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dimana menyangkut tempat oleh siapa pelaku itu atau pelaksana dan bagaimana tatacara mencapai itu.

Perencanaan merupakan aktifitas atau kegiatan yang ditentukan secara bersama sebelum kegiatan itu dimulai.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Rue dan Bias (2006:6) berpendapat, *organizing is grouping activities, assigning activities and providing the authority necessary to carry out the activities*. Pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan wewenang untuk melaksanakan kegiatannya.

Pengorganisasian merupakan aktifitas menentukan tugas dari masing-masing individu atau sekelompok orang agar terlaksananya kegiatan yang telah disepakati bersama.

3. Pengarahan (*actuating*)

Pengarahan *direction* adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Termasuk didalamnya memberitahukan orang lain apa yang

harus dilakukan dengan nada yang bervariasi mulai dari nada tegas sampai meminta atau bahkan mengancam.

Pengarahan merupakan kewenangan terhadap bawahannya agar diikuti baik secara lisan maupun tulisan.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya (Sutarno NS, 2004:128). Sedangkan tujuan dari pengawasan adalah menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan kesulitan sebelum kesulitan itu terjadi, mengadakan pencegahan dan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi sehingga mendapatkan efisiensi dan efektifitas.

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang agar tercapainya kinerja yang diinginkan.

Jadi pengelolaan merupakan aktivitas-aktivitas atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya dengan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.

5. Konsep Desa

Istilah desa berasal dari bahasa India *swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas (Yayuk dan Mangku, 2003).

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, dijelaskan desa merupakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis dan pemberdayaan masyarakat (widjaja, 2003)

Nurman (Wasistiono dan Tahir, 2006) yang memandang dari aspek geografis mendefinisikan desa sebagai, suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang di timbulkan oleh unsur-unsur fisiorafi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang sering berinteraksi antarunsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.

Akaria (2000) menyatakan, desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri. Definisi ini, menegaskan bahwa dese sebagai suatu unit kelembagaan pemerintahan mempunyai wewenang pengelolaan wilayah perdesaan.

Kuntjaraningrat, 1997 (Nurman) mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap di suatu daerah.

Sedangkan Bergel, 1995 (Nurman) menjelaskan desa sebagai setiap pemukiman para petani. Landis menguraikan pengertian desa dalam tiga aspek yaitu:

- a. Analisis statistik, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan dengan penduduk kurang dari 2.500 orang.
- b. Analisis sosial psikologis, desa merupakan suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan akrab dan bersifat informal di antara sesama warganya, dan
- c. Analisis ekonomi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan dengan penduduknya tergantung pada pertanian.

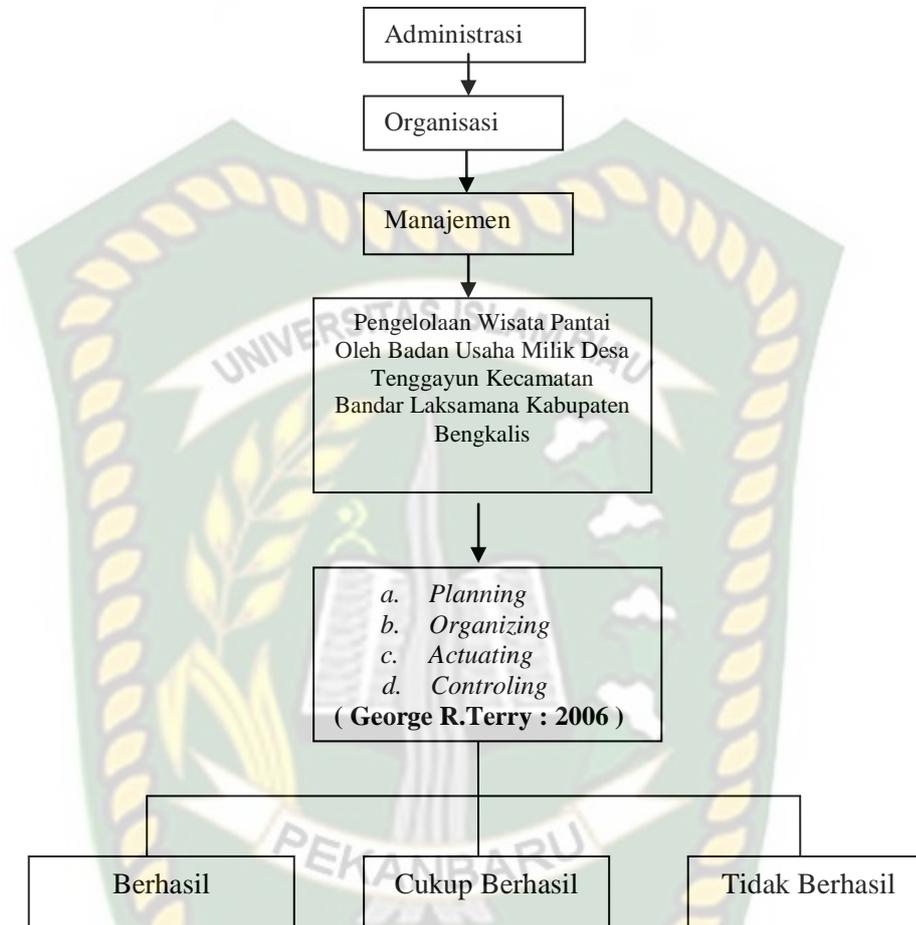
Tipologi desa dapat dilihat dari mata pencaharian dan pola interaksi sosial yang terbangun. Dari mata pencaharian pokok dapat ditentukan tipe desa beserta karakteristik dasarnya.

Menurut (wahjudin, 2004) tipologi desa dibagi sebagai berikut:

- a. Desa pertanian terdiri dari desa pertanian berlahan basah dan kering, desa perkebunan yang dikelola oleh masyarakat sebagai pemilik dan swasta, serta desa nelayan (tambak, perikanan darat, pantai dan laut).
- b. Desa peternakan, dimana mata pencaharian utama sebagian besar penduduknya peternakan. Dalam kenyataannya hingga saat ini sangat sulit dijumpai desa yang homogen, meski ada matapencaharian lain namun berternak menjadi matapencaharian utamanya.
- c. Desa industri. Tipologi ini dibagi dalam dua macam;
 1. Desa industri yang memproduksi alat pertanian secara tradisional maupun modern dengan sistem upah sesuai dengan “manajemen” masing-masing.
 2. Desa industri yang memproduksi barang kerajinan, seperti perabot rumah tangga terbuat dari kayu jati, rotan, dan bahan konfeksi.

Jadi desa merupakan kesatuan masyarakat yang jauh dari perkotaan, dimana mata pencarian masyarakat setempat umumnya tergantung pada pertanian dan laut.

Gambar II.I : Kerangka Pikir Penelitian Tentang Pengelolaan Wisata Pantai Oleh Badan Usaha Milik Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis



Sumber: ModifikasiPenulis 2019

B. Konsep Operasional

Guna menghindari dari kekeliruan dalam penggunaan istilah di dalam penulisan ini, maka berikut ini penulis akan menuangkan konsep-konsep yang telah dipaparkan sebelumnya dalam bentuk nyata secara operasionalnya tentang hasil kajian sebagai berikut :

1. Administrasi adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, dimulai dari proses pemikiran, proses pelaksanaan sampai proses tercapainya tujuan.
2. Organisasi adalah sebagai suatu kelompok individu yang diorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi memiliki tujuan umum dan tujuan spesifik, untuk mencapai tujuan tersebut, maka di buat norma aturan yang dipatuhi oleh semua anggota organisasi.
3. Manajemen adalah usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi.
4. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan kerja dalam mencapai tujuan tertentu.
5. Perencanaan merupakan aktifitas atau kegiatan yang ditentukan secara bersama sebelum kegiatan itu dimulai.
6. Pengorganisasian merupakan aktifitas menentukan tugas dari masing-masing individu atau sekelompok orang agar terlaksananya kegiatan yang telah disepakati bersama.
7. Pengarahan merupakan kewenangan terhadap bawahannya agar diikuti baik secara lisan maupun tulisan.
8. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang agar tercapainya kinerja yang diinginkan.

C. Operasional Variabel

Selanjutnya dapat dilihat operasional variabel yang meliputi konsep, variabel indikator, dari Pengelolaan Wisata Pantai Oleh Badan Usaha Milik Desa

Tenggayun Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari tabel berikut:

Table II.II :Operasional Variabel Pengelolaan Wisata Pantai Oleh Badan Usaha Milik Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis.

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala Ukuran
menurut Terry (2009:9) Pengelolaan sama dengan menejemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasi an, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen	Pengelolaan	<i>Planning</i>	a. Adanya peraturan / pedoman dalam melakukan pengelolaan wisata pantai b. Proses Pengelolaan wisata pantai. c. Penyelesaian pembangunan wisata pantai.	a. Berhasil b. Cukup Berhasil c. Kurang berhasil
		<i>Organizing</i>	a. Keterlibatan Masyarakat dalam pengelolaan wisata pantai b. Tingkat ketersediaan fasilitas wisata pantai. c. Kemampuan penanganan wisata pantai	a. Berhasil b. Cukup Berhasil c. Kurang Berhasil
		<i>Actuating</i>	a. Adanya peringatan dari wisata pantai b. Sangsi yang diberikan dari wisata pantai c. Motivasi dari wisata pantai	a. Berhasil b. Cukup Brhasil c. Kurang Berhasil

pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasi an, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan.		<i>Controlling</i>	a. Pembinaan terhadap wisata pantai b. Penilaian wisata pantai c. Hasil kinerja	a. Behasil b. Cukup Berhasil c. Kurang Berhasil
--	--	--------------------	---	---

Sumber: ModifikasiPenulis 2019.

D. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan tiga (3) kategori yaitu :

1. Berhasil : 3 Sekala Likert
2. Cukup berhasil : 2 Sekala LIkert
3. Kurang berhasil : 1 Sekala Likert

Tipe skala dalam pengukuran ini menggunakan Sekala Likert, digunakan untuk mendapatkan persentase persepsi dari satu indikator, hasil persepsi dari setiap indikator direkapitulasi dan ditarik persentase untuk satu variabel evaluasi, hasil persepsi disimpulkan berdasarkan rentang penelitian yang telah dirumuskan.

$$\text{Rumus Skala likert} = \frac{\text{Total Skor} \times 100}{\text{Skor Tertinggi}}$$

Untuk mengetahui Pengelolaan wisata pantai oleh badan usaha milik desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis terlaksana apabila :

Berhasil : Apabila 67-100 % indikator variabel diatas terlaksana.
 Cukup Berhasil : Apabila 34-66 % indikator variabel diatas terlaksana.
 Tidak Berhasil : Apabila 0-33 % dari indikator variabel diatas terlaksana.

1. Perencanaan, dikategorikan :

Berhasil : Apabila seluruh item penelitian Perencanaan mencakup 67-100 %.
 Cukup Berhasil : Apabila seluruh item penilaian Perencanaan mencakup 34-66 %.
 Tidak Berhasil : apabila seluruh item penilaian Perencanaan mencakup 0-33 %.

2. Pengorganisasian, dikategorikan :

Berhasil : Apabila seluruh item penelitian Pengorganisasian dapat dilaksana pada program mencakup 67-100 %
 Cukup Berhasil : Apabila seluruh item penilaian Pengorganisasian dapat dilaksana pada program mencakup 34-66 %.
 Tidak Berhasil : Apabila seluruh item penilaian Pengorganisasian dapat dilaksana pada program mencakup 0-33 %.

3. Pengarahan, dikategorikan :

Berhasil : Apabila seluruh item penilaian pengarahan dapat dilaksanakan pada program mencakup 67-100 %.

Cukup Berhasil : Apabila seluruh item penilaian pengarahan dapat dilaksanakan pada program mencakup 34-66 %.

Tidak Berhasil : Apabila seluruh item penilaian pengarahan dapat dilaksanakan pada program mencakup 0-33 %

4. Pengawasan, dikategorikan :

Berhasil : Apabila seluruh item penilaian pengawasan dapat dilaksanakan pada program mencakup 67-100 %.

Cukup Berhasil : Apabila seluruh item penilaian pengawasan dapat dilaksanakan pada program mencakup 34-66 %.

Tidak Berhasil : Apabila seluruh item penilaian pengawasan dapat dilaksanakan pada program mencakup 0-33 %.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Untuk mendapat data dan keterangan yang mendukung dalam penelitian ini maka penulis menggunakan penelitian deskriptif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya mengenai objek penelitian yang penulis teliti dengan memprioritaskan alat bantu penelitian yaitu koesioner yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antar variabel satu dengan yang lainnya (dalam Sugiono, 2003:11)

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2012:8) merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, dan digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Dikarenakan Penulis melihat pembangunan dan pengelolaan aset desa di desa Tenggayun tertinggal jika dibandingkan dengan desa tetangganya, sedangkan desa Tenggayun merupakan ibu kota Kecamatan Bandar Laksamana.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2012;80).

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Ketua BUMDes, Sekretaris BUMDes, Pedagang, dan Masyarakat per KK.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono 2012;85). Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Ketua BUMDes, Sekretaris BUMDes, Pedagang, dan Masyarakat.

Untuk lebih mengetahui jumlah populasi dan sampel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

Table III.I : Pengelolaan Wisata Pantai Oleh Badan Usaha Milik Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Ketua Bumdes	1	1	100%
3	Sekretaris BUMDes	1	1	100%
4	Pedagang	11	11	100%
5	Masyarakat per KK	525	50	9,52%
	Jumlah	539	64	

Sumber: Modifikasi Penulis 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik Penarikan Sample atau Teknik penarikan Sampling adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik yang penulis gunakan dalam Faktor-faktor Hambatan Dalam Pengelolaan Aset Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Pengelolaan Wisata Pantai) adalah menggunakan probability sample dengan menggunakan teknik propotional simple random sampling. Teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi ang dipilih utnut menjadi sample. (Sugiono, 2010:82)

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data dan sumber data yang dikumpulkan dengan menggunakan data primer dan data sekunder :

Data Primer Adalah data yang diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian lapangan tentang Pengelolaan Wisata Pantai Oleh Badan Usaha Milik Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis. Data yang diperoleh melalui penyebaran Quesioner (angket) dan hingga melakukan interview.

Data Sekunder Adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang berupa data yang diperoleh dari instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara yang dipakai penulis dalam mengumpulkan data dalam penelitian adalah teknik:

1. Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dan informasi secara menyeluruh dan mendalam yang dianggap mengerti permasalahan yang diteliti.
2. Quesioner, yaitu mempersiapkan dan mempergunakan daftar berupa pertanyaan yang diajukan kepada responden dan informan yang diberikan pertanyaan-pertanyaan dan alternatif jawaban. Sasaran dari teknik quesioner ini adalah seluruh responden.
3. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data-data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimbau melalui pengamatan penelitian menggunakan pancaindera.
4. Dokumentasi, yaitu data yang penulis peroleh dari penyalinan buku-buku, arsip, Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Desa dan dari karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif yaitu penulis berusaha memberikan gambaran yang terperinci berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ditemukan di lapangan. Kemudian data yang ada dikelompokkan menurut jenisnya lalu disusun dan dianalisis selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel dan dalam uraian analisis ditambah dengan analisis kualitatif dalam bentuk tabel.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Desa Tenggayun merupakan Desa yang berada di Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Bandar Laksamana, Desa Tenggayun telah ada sejak tahun 1904, yang dibuka oleh keturunan kerajaan Siak, dan umumnya masyarakat setempat adalah suku Melayu, Nama Tenggayun di ambil dari adanya nama pohon besar yang bernama pohon Tenggayun, maka saat itu diberilah nama Desa tersebut Desa Tenggayun sampai saat ini, Letak Desa Tenggayun berada di pesisir Timur pulau Sumatera, Tepatnya Tepi jalan lintas Kota Dumai-Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, Dimana Desa Tenggayun dahulunya termasuk dari bagian Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, Namun Desa Tenggayun ini telah mekar dan membentuk Kecamatan sendiri dengan Desa-Desa tetangganya.

Adapun jumlah penduduk desa tenggayun dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel IV.I : Jumlah penduduk Desa tenggayun.

No	Penduduk	Jumlah
1	Laki-laki	998
2	Perempuan	1011
	Total	2009

Sumber : Program Jangka Menengah 2014-2020 Desa Tenggayun

Penduduk Desa Tenggayun berjumlah 2009 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 525 KK, dan jumlah keluarga miskin berjumlah 140 KK, adapun jumlah penduduk laki-laki berjumlah 998 jiwa adapun jumlah penduduk perempuan berjumlah 1011 jiwa.

Umumnya masyarakat Desa Tenggayun berpenghasilan sebagai petani, dimana terpadat 1290 orang yang mata pencariannya sebagai petani, buruh tani 38

orang, nelayan 35 orang, pegawai negeri sipil 34 orang, montir 4 orang, dukun kampung terlatih 6 orang, jumlah penduduk usia produktif 935 orang, luas Desa Tenggayun 2.250 Ha dimana mayoritas penyebaran penduduk berada daerah perkebunan dan pantai.

Tabel IV. II : Mata Pencarian Masyarakat Desa Tenggayun.

N0	Jenis pekerjaan	Jumlah
1	Petani	1290 orang
2	Buruh Tani	38 orang
3	Nelayan	35 orang
4	Pegawai Negeri Sipil	34 orang
5	Montir	4 orang
6	Dukun kampung terlatih	6 orang
Total		1407

Sumber : Program Jangka Menengah 2014-2020 Desa Tenggayun

Untuk wilayah administrasi desa Tenggayun terbagi dalam 3 (tiga) dusun, yakni dusun harapan, dusun melati dan dusun amalia, selain itu terdapat 6 (enam) rukun warga yang di ketuai oleh ketua RW dan 11 (sebelas) rukun tetangga yang di ketuai oleh ketua RT. Dan didukung oleh Badan Permusyawaratan Masyarakat (BPD), dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPMD). Selain itu juga terdapat organisasi pemuda, Karang Taruna, Majelis Taklim, khusus untuk perempuan di bentuk beberapa perkumpulan-perkumpulan seperti Dasa Wisma, Rebana, dan PKK.

Visi dan misi desa Tenggayun adalah:

1. Visi

Menjadikan desa Tenggayun aman, sejahtera dan menjunjung tinggi naluri kebersamaan.

2. Misi

- a. Meningkatkan pembangunan desa berbasis masyarakat
- b. Meningkatkan pembangunan desa secara merata dan terbuka
- c. Memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat
- d. Memberdayakan sifat gotong royong masyarakat
- e. Meningkatkan jiwa social (kerja sama) sesama masyarakat

Berdasarkan program jangka menengah tahun 2014-2020 data infrastruktur desa Tenggayun yaitu:

- a. Jalan

Panjang aspal	: 4500 m
Panjang jalan beton	: 7208 m
Panjang jalan tanah	: 8250 m
- b. Jembatan

Jembatan kayu	: 9 unit
Jembatan beton	: 27 unit
Gorong-gorong	: 5 unit
- c. Air minum

Sumur bor	: 51 unit
Sumur gali	: 18 unit
PAH	: 278 unit
- b. Prasarana dan sarana lainnya

Kantor	: 4 unit
Puskesdes	: 1 unit
Gedung sekolah	: 9 unit
Pasar desa	: 1 unit

Selanjutnya berdasarkan peraturan desa Tenggayun Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 tentang tatacara pembentukan dan pengelolaan

badan usaha milik desa Tenggayun sejahtera desa Tenggayun, bab III jenis usaha pasal 7 dijelaskan yakni:

1. Jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - a. Bisnis social
 - 1) Listrik desa
 - 2) Air minum desa
 - 3) Bisnis lainnya
 - b. Bisnis penyewaan
 - 1) Alat transportasi
 - 2) Perkakas pesta
 - 3) Gedung pertemuan
 - 4) Rumah toko
 - 5) Penyewaan tanah BUM desa
 - 6) Penyewaan lainnya
 - c. Bisnis perantara
 - 1) Jasa listrik
 - 2) Jasa penitipan barang di pasar desa
 - 3) Jasa pengiriman barang
 - 4) Pasar desa
 - 5) Jasa lainnya
 - d. Bisnis perdagangan
 - 1) Pabrikas
 - 2) Pabrik pengolahan karet
 - 3) Pabrik pengolahan bata
 - 4) Perdagangan jenis lainnya
 - e. Bisnis keuangan
 - 1) UED-SP
 - 2) Simpan pinjam masyarakat lainnya
 - f. Bisnis holding (usaha bersama antar unit dikelola langsung oleh BUM des
 - 1) Desa wisata
 - 2) Dan kegiatan usaha bersekala besa lainnya
2. Unit usaha BUM desa yang ada dan yang akan dibentuk
 - a. Unit usaha ekonomi desa – simpan pinjam
 - b. Pariwisata
 - c. Pasar desa
 - d. Koperasi Tenggayun mandiri

Namun dari usaha yang dikelola tersebut, yang dijalankan oleh badan usaha milik desa Tenggayun hanya beberapa saja diantaranya meliputi:

1. UED-Sp
2. Desa Wisata
3. Pasar Desa

UED-Sp merupakan usaha ekonomi desa simpan pinjam, dimana desa membantu masyarakat yang membutuhkan, dengan tujuan agar masyarakat bias berwirausaha sehingga dengan masyarakat adanya usaha maka bias meningkatkan pendapatan masyarakat tersebut.

Desa wisata merupakan desa memanfaatkan kekayaan milik desa yang dikelola secara langsung untuk membantu masyarakat desa dan sebagai sumber pendapatan desa, serta didesa Tenggayun desa wisata di kelola oleh badan usaha milik desa.

Pasar desa merupakan desa diberi wewenang membentuk suatu wadah, dimana wadah tersebut adanya transaksi jual beli dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Sebelum di bahas mengenai Pengelolaan Wisata Pantai Oleh Badan Usaha Milik Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis, terlebih dahulu diuraikan identitas responden dalam penelitian.

1. Jenis Kelamin Responden Penelitian

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai identitas responden, maka berikut ini penulis akan menguraikan mengenai identitas responden berdasarkan jenis kelamin.

Tabel V.I : keadaan responden berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	25	40,99%
2	Perempuan	36	59,01%
	Jumlah	61	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa 61 orang responden berjenis laki-laki 31 orang atau sebesar 40,99% dan sebanyak 36 orang responden berjenis kelamin perempuan atau sebesar 59,01% . Dengan demikian,dapat dikatakan responden yang diteliti bersifat heterogen atau tidak hanya satu jenis kelamin saja.

2. Usia Responden

Berdasarkan hasil wawancara dan penyebaran angket yang telah di ajukan kepada 61 orang responden, maka dapat diketahui usia para responden tersebut. Setelah usia

responden dipilih dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok usia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel V.2 : keadaan responden berdasarkan kelompok usia

No	Kelompok Usia	Frekuensi	Presentasi
1	20-30	42	68,85%
2	31-40	10	16,40%
3	41-50	7	11,47%
4	>51	2	3,27%
	Jumlah	61	100%

Sumber : Hasil Pebelitian, 2019

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 61 orang responden tersebut sejumlah 42 orang atau sebesar 68,85% yang termasuk usia 20-30 tahun. Sedangkan untuk kelompok usia 31-40 tahun sebanyak 10 orang atau sebesar 16,40%, dan kelompok usia antara 41-50 terdapat sejumlah 7 orang atau sebesar 11,47% dan responden usianya di atas 51 tahun sebesar 2 orang atau 3,27%.

3. Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan adalah sarana untuk mengembangkan diri, sebab dengan pendidikan kita dapat mengukur kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah. Selanjutnya di uraikan tingkat reponden yang terdiri dari 61 orang. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.3 : Keadaan Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentasi
1	SD	2	3,29%
2	SLTP	5	8,20%
3	SLTA	23	37,70%
4	Diploma	11	18,03%
5	Sarjana	20	32,78%
	Jumlah	61	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 61 orang yang menjadi responden dalam penelitian ini, sejumlah 2 orang atau sebesar 3,29% berpendidikan SD, dan yang berpendidikan SLTP sebanyak 5 orang atau sebesar 8,20%, sedangkan yang berpendidikan SLTA sebesar 23 orang atau sebesar 37,70%. Sementara responden berpendidikan diploma sebanyak 11 orang atau sebesar 18,03% dan pendidikan Sarjana sebanyak 20 orang atau 32,78%. Dengan demikian, tentunya semua responden yang menjadi objek dalam penelitian ini memahami proses pengelolaan aset desa tenggayun.

B. Pengelolaan Wisata Pantai Oleh Badan Usaha Milik Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis

Kesejahteraan masyarakat merupakan budaya setiap bangsa khususnya Indonesia, sesuai yang tercantum di dalam UUD 1945 alenia ke 4 bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia merupakan cita-cita bangsa, maka dari itu untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Peran pemerintah sangatlah penting.

Di Indonesia masyarakat desa sangat berbeda bila di bandingkan dengan masyarakat yang ada di luar desa. Untuk itu pembangunan hendaklah dimulai dari pedesaan, maka dari itu peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan baik itu tingkat kabupaten/kota, kecamatan, sampai ke pemerintah desa.

Istilah desa berasal dari bahasa swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas (Yayuk dan Mangku, 2003).

Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan tujuan tertentu

(Admosudirjo, 2005 ; 160). Pengelolaan asset desa merupakan sebuah cara ataupun usaha dalam proses ataupun sebuah rangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dimulai dari perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada pengawasan untuk mencapai sebuah tujuan (Risnawati, 2017)

Untuk mewujudkan suatu desa yang sejahtera sangat dibutuhkan kepala desa yang adil, jujur, bertanggung jawab dan mempunyai perstasi kerja yang sangat bagus untuk memimpin desanya. Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang kepala desa dalam melaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara,2018 : 158), seedangkan menurut Hasibuan mengemukakan pendapatnya bahwa prestasi kerja merupakan suatu hasil kerja yang di capai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang di bebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, dan kesungguhan serta waktu.

Untuk lebih jelasnya mengenai pembahasan pada Pengelolaan Wisata Pantai Oleh Badan Usaha Milik Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada uraian berikut :

1. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dimana menyangkut tempat oleh siapa pelaku itu atau pelaksana dan bagaimana tatacara mencapai itu.

Penilai menilai perencanaan BUMDes dalam mempertanggung jawabkan kebijaksanaannya, pekerjaan, dan hasil kerjanya, sarana dan prasarana yang

digunakannya, serta prilaku kerjanya. Untuk lebih jelas mengenai indikator perencanaan, dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.4 : Distribusi Jawaban Responden (Pedagang dan Masyarakat) Terhadap Indikator Perencanaan.

No	Item penilaian	Kriteria Jawaban			Jumlah
		Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil	
1.	Pengelolaan wisata pantai terhadap peraturan pemerintah desa Tenggayun.	6	11	44	61
2.	Ketetapan waktu dalam pembangunan di wisata pantai	5	17	39	61
3.	Keberhasilan pembangunan wisata pantai	5	7	49	61

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2019

Dari tabel V.4 dapat dilihat bahwa 61 responden, untuk item pengelolaan wisata pantai terhadap peraturan pemerintah desa yang dikelola oleh BUMDes Secara langsung, yang menjawab berhasil berjumlah 6 orang, Yang menjawab cukup berhasil berjumlah 11 orang, dan 44 orang yang menjawab tidak berhasil terhadap pengelolaan wisata pantai desa Tenggayun.

Item penilaian kedua mengenai ketetapan waktu dalam pembangunan wisata pantai berhasil sebanyak 5 orang responden pedagang dan masyarakat. Ditanggapi cukup berhasil oleh pedagang dan masyarakat sebanyak 17 orang pedagang dan masyarakat. Adapun tanggapan tidak berhasil sebanyak 39 orang.

Kemudian item penilaian keterlibatan pedagang dan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan wisata pantai, dari jumlah responden pedagang dan masyarakat, 5 responden menanggapi berhasil dan 7 responden menanggapi cukup berhasil. 49 responden menanggapi tidak berhasil.

Tabel V.5 : Analisis Distribusi Responden (Pedagang dan Masyarakat) terhadap Indikator Perencanaan.

No	Item Penilaian	Kriteria Jawaban			jumlah
		Berhasil	Cukup Brhasil	Tidak Berhasil	
		(3)	(2)	(1)	
1.	Pengelolaan wisata pantai terhadap peraturan pemerintah desa Tenggayun.	18	22	44	82
2.	Ketetapan waktu dalam pembangunan di wisata pantai	15	34	39	88
3.	Keberhasilan pembangunan wisata pantai	15	14	49	78
Total Skor					248

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2019

Skor Tertinggi = Jumlah Responden x Kategori Tertinggi

$$= 61 \times 3$$

$$= 183$$

Skoe Tertinggi Indikator = Skor Tertinggi x Jumlah Item Yang Dinilai

$$= 183 \times 3$$

$$= 549$$

Persentase : Total Skor

$$\frac{\text{Skor Tertinggi}}{\text{Total Skor}} \times 100$$

$$: 248$$

$$\frac{549}{248} \times 100$$

: 45,17% (**Cukup Berhasil**)

Berdasarkan hasil jawaban responden Masyarakat Mengenai indikator Perencanaan dalam Pengelolaan Wisata Pantai Oleh Badan Usaha Milik Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis adalah sebesar 45,17%

“Cukup Berhasil”

Hasil wawancara dengan Kepala desa tenggayun diperoleh informasi berikut:

Pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat setempat : dari pernyataan kepala desa Tenggayun dengan adanya objek wisata pantai desa tenggayun maka dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, dan masyarakat bisa berwirausaha misalnya dengan cara berjualan di sekitar pantai. (wawancara pada tanggal 26 agustus 2019)

Serta penulis juga melakukan wawancara dengan ketua BUMDes dan Sekretaris

BUMDes diperoleh informasi berikut:

Pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat : dari pernyataan ketua BUMDes bahwa dengan adanya wisata pantai di desa Tenggayun sangat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Sementara sekretaris BUMDes menjelaskan bahwa benar dengan adanya wisata pantai desa Tenggayun sangat membantu perekonomian masyarakat khususnya masyarakat setempat, namun wisata pantai Tenggayun masih sangat memerlukan pengelolaan yang memadai hal ini dikarenakan kurangnya bantuan dana dari pemerintah desa Tenggayun (wawancara pada tanggal 27 agustus 2019)

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan terhadap pengelolaan wisata pantai desa Tenggayun kurang efektif dimana wisata pantai desa Tenggayun sangat kurang akan wahana atau tempat bermain bagi pengunjung.

Selanjutnya untuk distribusi terhadap desa dijelaskan juga oleh ketua BUMDes Tenggayun dan Kepala desa Tenggayun belum ada distribusi yang di tetapkan namun

hanya saja jumlah dari pendapatan tersebut ada disalurkan ke desa sebesar 25% dari hasil pendapatan

Serta adanya iuran/pungutan biaya terhadap pedagang, petugas parkir dan penyedia wahana yang bersifat pribadi di sekitaran pantai, biaya tersebut dipergunakan untuk kebersihan, dan juga sebagai partisipasi untuk perbaikan atau penambahan biaya pembangunan diwisata pantai, iuran/pungutan biaya tersebut dijalankan saat hari-hari libur saja.

Dari penjelasan diatas, data hasil wawancara serta hasil pengamatan dilapangan dapat ditarik sebuah kesimpulan dari Pemerintah desa Tenggayun yakni BUMDesa dan sekretaris BUMDes Tenggayun telah melaksanakan pengelolaan wisata pantai sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, akan tetapi wisata pantai Tenggayun masih adanya kendala untuk dijadikan sebagai wisata yang diminati banyak pengunjung, hal ini dikarenakan kurangnya fasilitas yang ada diwisata panta Tenggayun, kurangnya fasilitas di wisata pantai Tenggayun disebabkan kurangnya dana BUMDes untuk melakukan pembangunan diwisata pantai Tenggayun.

2. Organizing (Pengorganisasian)

Rue dan Bias (2006:6) berpendapat, *organizing is grouping activities, assigning activities and providing the authority necessary to carry out the activities.*

Pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan wewenang untuk melaksanakan kegiatannya.

Tabel V.6 : Distribusi Jawaban Responden (Pedagang dan Masyarakat) Terhadap Indikator Pengorganisasian.

No	Item Penilaian	Kriteria jawaban			Jumlah
		Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil	
1.	Keterlibatan Masyarakat dalam pengelolaan wisata pantai	21	10	30	61
2.	Pandangan masyarakat terhadap fasilitas wisata pantai	13	19	29	61
3.	kemampuan dalam menghadapi permasalahan di wisata pantai	13	14	34	61

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel yang disajikan diatas dapat kita lihat bahwa untuk item penilaian Cara pemerintah desa dan BUMDes Tenggayun menangani permasalahan dan memberikan solusi di wisata pantai tenggayun dari jumlah responden pedagang dan masyarakat yaitu 61 orang responden, 21 orang responden menanggapi berhasil, Kemudian 10 orang responden menanggapi cukup berhasil, Dan 30 orang responden yang menanggapi Tidak Berhasil.

Pada item penilaian kedua mengenai Pandangan masyarakat terhadap fasilitas wisata pantai, Dari jumlah responden yaitu 61, yang menanggapi Berhasil berjumlah 13 orang responden, Selanjutnya 19 responden menanggapi cukup berhasil, Lalu 29 orang responden pedagang dan masyarakat mananggapi Tidak Berhasil Pandangan masyarakat terhadap fasilitas wisata pantai diwisata pantai desa Tenggayun.

Item penilaian selanjutnya yaitu Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata pantai dimana 13 orang responden pedagang dan masyarakat menanggapi

berhasil, Kemudian 14 orang responden menanggapi Cukup Berhasil lalu 34 orang responden menanggapi Tidak Terlaksana terhadap Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata pantai desa Tenggayun.

Tabel V.7: Analisis Distribusi Responden (Pedagang dan Masyarakat) terhadap Indikator Pengorganisasian

No	Item Penilaian	Kriteria jawaban			Jumlah
		Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil	
		(3)	(2)	(1)	
1.	Keterlibatan Masyarakat dalam pengelolaan wisata pantai	63	20	30	113
2.	Pandangan masyarakat terhadap fasilitas wisata pantai	39	38	29	106
3.	kemampuan dalam menghadapi permasalahan di wisata pantai	39	28	34	101
Total Skor					320

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Skor Tertinggi = Jumlah Responden x Kategori Tertinggi

$$= 61 \times 3$$

$$= 183$$

Skoe Tertinggi Indikator = Skor Tertinggi x Jumlah Item Yang Dinilai

$$= 183 \times 3$$

$$= 549$$

Persentase : Total Skor

$$\frac{\text{Skor Tertinggi}}{\text{Total Skor}} \times 100$$

$$: \frac{183}{320}$$

$$549 \times 100$$

$$: 58,28\% \text{ (Cukup Berhasil)}$$

Berdasarkan hasil jawaban responden Pedagang dan Masyarakat mengenai Indikator Pengorganisasian terhadap Pengelolaan Wisata Pantai Oleh Badan Usaha Milik Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis adalah sebesar 58,28% **“Cukup Berhasil”**.

Hasil wawancara dengan kepala desa tenggayun diperoleh informasi beriku:

Adanya keterlibatan pedagang dan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata pantai desa tenggayun dimana pedagang dan msyarakat dilibatkan menyediakan kuliner, petugas parkir, keamanan, dan masyarakat juga diperbolehkan membawa pengunjung mengelilingi perairan sekitaran pantai dengan menggunakan speedboat masyarakat, sehingga adanya pendapatan bagi masyarakat tersebut. (Wawancara pada tanggal 26 agustus 2019)

Sementara itu hasil wawancara penulis dengan ketua BUMDes dan Sekretaris

BUMDes Tenggayun diperoleh informasi berikut :

Adanya kerjasama dalam pengelolaan wisata pantai desa Tenggayun dengan dinas perikanan dan kelautan namun kerja sama tersebut terhenti, Serta BUMDes Tenggayun dalam menjalankan tugasnya terhambat oleh biaya karena ditahun 2018 pemerintah desa Tenggayun menyalurkan dana 80 juta rupiah, dengan 80 juta rupiah tersebut maka BUMDes tenggayun membagikan sebanyak tiga dari usaha yang dijalankan oleh BUMDes Tenggayun salah satunya wisata pantai Tenggayun sebanyak 25% dari dana yang di salurkan desa, dengan dana tersebut BUMDES membangun tempat berjualan, penambahan fasilitas umum (Wawancara pada tanggal 27 agustus 2019).

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan diwisata pantai desa Tenggayun adanya kerjasama antar pemerintah desa Tenggayun dengan dinas perikanan dan kelautan namun kerjasama tersebut terhenti sehingga pembangunan diwisata pantai desa Tenggayun tidak lagi berlanjut.

Dari uraian data wawancara diatas serta hasil pengawasan dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa benar adanya dugaan penulis pemerintah desa Tenggayun dengan Dinas Perikanan dan Kelautan yang tidak lagi berjalan sehingga ada beberapa

perencanaan pembangunan wisata pantai desa Tenggayun tidak sesuai dengan yang diharapkan.

3. *Actuating* (Pengarahan)

Pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Tujuannya adalah agar tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik. Fungsi pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manager untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya.

Tabel V.8 : Distribusi Jawaban Responden (Pedagang dan Masyarakat) Terhadap Indikator Pengarahan.

No	Item Penilaian	Kriteria jawaban			Jumlah
		Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil	
1	Himbauan bagi pengunjung terhadap waktu yang ditentukan untuk pengunjung turun kepantai	5	15	41	61
2	Sanksi karyawan yang melakukan pelanggaran wisata pantai	11	20	30	61
3	Motivasi yang diberikan BUMDes dalam melayani pengunjung.	3	22	36	61

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Pada tabel V.8 dapat dilihat dari 61 responden pedagang dan masyarakat pada item penilaian pertama yaitu Himbauan bagi pengunjung terhadap waktu yang

ditentukan untuk pengunjung turun kepantai 5 responden menanggapi berhasil, Selanjutnya 15 responden menanggapi cukup berhasil dan 41 responden menanggapi tidak berhasil.

Selanjutnya pada item penilaian kedua yaitu Sanksi yang diberikan terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran wisata pantai dari 61 responden pedagang dan masyarakat 11 responden menanggapi berhasil, Selanjutnya 20 responden menanggapi cukup berhasil dan 30 responden menanggapi tidak berhasil.

Item penilaian terakhir yaitu Motivasi yang diberikan BUMDes dalam melayani pengunjung dari jumlah responden pedagang dan masyarakat, 3 responden menanggapi berhasil, Selanjutnya 22 orang responden menanggapi cukup berhasil dan 36 orang responden menanggapi tidak berhasil.

Tabel V.9 : Analisis Distribusi Responden (Pedagang dan Masyarakat) terhadap Indikator Pengarahan.

No	Item Penilaian	Kriteria jawaban			Jumlah
		Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil	
		(3)	(2)	(1)	
1	Himbauan bagi pengunjung untuk pengunjung turun kepantai	15	30	41	86
2	Sanksi untuk karyawan yang melakukan pelanggaran wisata pantai	33	40	30	103
3	Motivasi yang diberikan BUMDes dalam melayani pengunjung	9	44	36	89
Total Skor					278

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

$$\begin{aligned}\text{Skor Tertinggi} &= \text{Jumlah Responden} \times \text{Kategori Tertinggi} \\ &= 61 \times 3 \\ &= 183\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Skor Tertinggi Indikator} &= \text{Skor Tertinggi} \times \text{Jumlah Item Yang Dinilai} \\ &= 183 \times 3 \\ &= 549\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Persentase : Total Skor} &= \frac{\text{Skor Tertinggi}}{\text{Skor Tertinggi Indikator}} \times 100 \\ &= \frac{278}{549} \times 100 \\ &= 50,63\% \text{ (Cukup Berhasil)}\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil jawaban responden masyarakat mengenai indikator pengarahannya dalam Pengelolaan Wisata Pantai Oleh Badan Usaha Milik Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis adalah sebesar 50,63% **Cukup Berhasil**.

Hasil wawancara dengan kepala desa tenggayun diperoleh informasi berikut:

Masih adanya lahan milik masyarakat desa setempat, sehingga pemerintah desa terhambat dalam pembangunan pengelolaan wisata pantai. Namun pemerintah desa selalu berupaya untuk bernegosiasi dengan masyarakat untuk peralihan lahan. (Wawancara pada tanggal 26 Agustus 2019)

Serta hasil wawancara penulis dengan ketua BUMDes dan Sekretaris BUMDes menjelaskan bahwa :

Terhambatnya pembangunan di wisata pantai desa Tenggayun dikarenakan masih adanya lahan tanah milik masyarakat setempat yang masyarakat tersebut belum mau dihibahkan kepada pemerintah desa, serta kurangnya dana untuk BUMDes dalam mengelola wisata pantai Tenggayun (Wawancara pada tanggal 27 Agustus 2019).

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan dimana kurangnya arahan dari pengelolaan wisata pantai terhadap batasan pengunjung yang mandi ditepi pantai.

Dari uraian data diatas serta hasil pengamatan dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan dalam pembangunan wisata pantai desa Tenggayun yang dikarenakan masih adanya lahan tanah milik masyarakat, seharusnya pemerintah desa Tenggayun berupaya menjalin kerjasama dengan Dinas Pariwisata kabupaten Bengkalis dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, Serta Pemerintah desa Tenggayun hendaknya meningkatkan lagi dana yang disalurkan ke BUMDes.

4. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya (Sutarno NS, 2004:128). Tujuan dari pengawasan adalah menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan kesulitan sebelum kesulitan itu terjadi, mengadakan pencegahan dan perbaikanterhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi sehingga mendapatkan efesiensi dan efektifitas.

Tabel V.10 : Distribusi Jawaban Responden (Pedagang dan Masyarakat) Terhadap Indikator Pengawasan.

No	Item Penilaian	Kriteria jawaban			Jumlah
		Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil	
1.	Pembinaan terhadap karyawan dalam pengelolaan wisata pantai	8	8	45	61
2.	Kepuasan masyarakat terhadap fasilitas di wisata pantai	5	6	50	61
3.	Tanggapan masyarakat terhadap kinerja dari para pekerja di wisata pantai	3	13	45	61

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Pada tabel V.10 dapat dilihat dari 61 responden pedagang dan masyarakat pada item Pengelolaan objek wisata yang meningkatkan perekonomian masyarakat dari 8 responden menanggapi berhasil, Selanjutnya 8 responden menanggapi cukup berhasil dan 45 responden menanggapi tidak berhasil.

Selanjutnya pada item penilaian kedua yaitu Kepuasan masyarakat terhadap fasilitas di wisata pantai dari 61 responden pedagang masyarakat, 5 responden menanggapi berhasil, Selanjutnya 6 responden menanggapi cukup berhasil dan 50 responden menanggapi tidak berhasil.

Item penilaian terakhir yaitu Pembinaan terhadap karyawan dalam pengelolaan wisata pantai dari jumlah 61 responden pedagang dan masyarakat, 3 responden menanggapi berhasil, Selanjutnya 13 orang responden menanggapi cukup berhasil dan 45 orang responden menanggapi tidak berhasil.

Tabel V.11 : Analisis Distribusi Responden (Pedagang dan Masyarakat) terhadap Indikator Pengawasan.

No	Item Penilaian	Kriteria jawaban			Jumlah
		Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil	
		(3)	(2)	(1)	
1.	Pembinaan terhadap karyawan dalam pengelolaan wisata pantai	24	16	45	85
2.	Kepuasan masyarakat terhadap fasilitas di wisata pantai	15	12	50	77
3.	Tanggapan masyarakat terhadap kinerja dari para pekerja di wisata pantai	9	26	45	80
Total Skor					242

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Skor Tertinggi = Jumlah Responden x Kategori Tertinggi

$$= 61 \times 3$$

$$= 183$$

Skoe Tertinggi Indikator = Skor Tertinggi x Jumlah Item Yang Dinilai

$$= 183 \times 3$$

$$= 549$$

Persentase : Total Skor

$$\frac{\text{Skor Tertinggi}}{\text{Total Skor}} \times 100$$

$$: 242$$

$$549 \times 100$$

$$: 44,08\% \text{ (Cukup Berhasil)}$$

Berdasarkan hasil jawaban responden pedagang dan masyarakat mengenai indikator pengawasan dalam Pengelolaan Wisata Pantai Oleh Badan Usaha Milik Desa

Tenggayun Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis adalah sebesar 44,08%

Cukup Berhasil.

Hasil wawancara dengan kepala desa tenggayun diperoleh informasi berikut:

Di adakannya promosi dengan kenduri adat melayu dengan melibatkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tersebut, maka daya tarik pengunjung akan semakin meningkat. (Wawancara pada tanggal 26 agustus, 2019).

Serta hasil wawancara penulis lakukan dengan ketua BUMDes dan Sekretaris BUMDes Tenggayun sebagai berikut:

Menjelaskan bahwa adanya kenduri adat melayu yang dilakukan, maka akan meningkatkan pengunjung untuk berwisata di pantai desa Tenggayun, Serta dengan adanya Rumah couple maka bisa meningkatkan pengunjung misalnya mancing.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis merasa kurangnya pengawasan terhadap pengunjung yang turun kepantai, dimana hal ini dapat beresiko bagi keselamatan pengunjung.

Berdasarkan dari uraian diatas serta hasil pengamatan dilapangan dapat ditarik kesimpulan, benar adanya dugaan penulis bahwa kurangnya tanggapan dari pemerintah desa dan BUMDes Tenggayun dalam menanggapi aspirasi masyarakat untuk mengembangkan potensi desa Tenggayun yaitu wisata pantai, karena promosi dalam meningkatkan wisata pantai hanya terfokus kepada kenduri adat melayu saja dan adanya rumah couple.

Selanjutnya agar lebih jelas dan tertata setiap indikator yang sudah diuraikan perlu di rangkum dalam sebuah tabel persentase yang juga memiliki hubungan yang langsung terkait dengan setiap indikator tersebut. Dimana tabel tersebut berisikan empat indikator

lengkap dengan tingkat implementasinya dalam bentuk persentase, berikut adalah tabel rekapitulasi keseluruhan dari empat indikator yang di analisis secara detail :

Tabel V.12 : Rekapitulasi Tanggapan Responden (Pedagang dan Masyarakat) dalam Penelitian Tentang Pengelolaan Wisata Pantai Oleh Badan Usaha Milik Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis .

No.	Variabel	Indikator	Persentase
1.	Pengelolaan	Perencanaan	45,17%
2.		Pengorganisasian	58,28%
3.		Pengarahan	50,63%
4.		Pengawasan	44,08%
Total			198,16%
Rata-rata			49,54%
Kategori			Cukup Berhasil

Sumber : Olahan Data Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel V.12 yang menjelaskan hasil rekapitulasi jawaban dari responden pedagang dan masyarakat terhadap Pengelolaan Wisata Pantai Oleh Badan Usaha Milik Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis berjumlah 49,54% sesuai dengan penjelasan sebelumnya persentase 34-66% berada dalam kategori “ **Cukup Berhasil**” artinya semua indikator cukup berhasil.

Pada indikator Perencanaan, berdasarkan hasil jawaban responden pedagang dan masyarakat item penilaian yang berhasil yaitu Pengelolaan wisata pantai terhadap peraturan pemerintah desa Tenggayun. Sedangkan item penilaian yang tidak berhasil yaitu keterlibatan musyawarah masyarakat terkait dengan pembangunan wisata pantai desa Tenggayun .

Untuk indikator Pengorganisasian, berdasarkan hasil jawaban responden pedagang dan masyarakat item penilaian berhasil yaitu Cara pemerintah desa menangani permasalahan dan memberikan solusi diwisata pantai tenggayun. Sedangkan item penilaian yang tidak berhasil yaitu keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan wisata pantai desa Tenggayun.

Sedangkan indikator Diposisi Pengarahan, pada indikator ini item penilaian yang berhasil yaitu sanksi yang diberikan terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran dalam pengelolaan wisata pantai. Adapun item penilaian yang tidak berhasil yaitu himbawan bagi para pengunjung terhadap waktu yang telah di tentukan untuk pengunjung turus ke pantai.

Kemudian untuk indikator Pengawasan, berdasarkan hasil jawaban responden pedagang dan masyarakat , item penilaian yang berhasil yaitu pandangan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Sedangkan item penilaian yang tidak berhasil yaitu kepuasan masyarakat terhadap terhadap fasilitas di wisata pantai.

Penulis melakukan analisis dari setiap indikator yang penulis jadikan sebagai penilaian diantaranya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Serta penulis juga melakukan wawancara terhadap kepala desa, ketua BUMDes dan sekretaris BUMDes. Maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wisata pantai yang dilakukan oleh badan usaha desa Tenggayun belum dikategorikan berhasil melainkan dikategori cukup berhasil. Karena rata-rata dari indiktaror responden tersebut berjumlah 49,54% (Cukup Berhasil). Sedangkan wawancara yang penulis lakukan terhadap kepala desa, ketua BUMDes dan sekretaris BUMDes penulis menilai masih banyaknya kekurangan diwisata pantai Tenggayun. Dengan itu, wisata pantai Tenggayun sangat

perlu pengelolaan yang lebih bermutu atau pengelolaan yang bisa menarik minat pengunjung.

C. Hambatan Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Oleh Badan Usaha Milik Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis.

Hambatan yang di hadapi dalam pengelolaan wisata pantai oleh Badan Usaha Milik Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis antara lain:

1. Sarana dan Prasarana Pendukung
Masih kurangnya wahana bermain bagi pengunjung sehingga pengunjung tidak terlalu puasa dengan fasilitas yang ada.
2. Keterbatasan Lahan
Masih adanya lahan milik masyarakat desa, sehingga pemerintah desa sulit melakukan perencanaan pembangunan untuk wisata pantai desa Tenggayun.
3. Kurangnya dana
Kurangnya dana yang di salurkan oleh pemerintah desa ke BUMDes, sehingga BUMDes sulit dalam melakukan pengelolaan wisata pantai desa Tenggayun.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis menyimpulkan, bahwa pengelolaan wisata pantai Tenggayun yang dikelola oleh badan usaha milik desa (BUMDes) Tenggayun penulis menilai tidak baik, karena di lihat dari indikator yang penulis jadikan sebagai penilaian diantaranya:

1. *Planning* (Perencanaan) Berdasarkan hasil jawaban responden masyarakat sebesar 45,17% (Cukup Berhasil), karena wisata pantai Tenggayun terdapat warung pedagang, akan tetapi warung pedagang tersebut kurang rapi.
2. *Organizing* (Pengorganisasian) Berdasarkan hasil jawaban responden Pedagang dan Masyarakat mengenai Indikator Pengorganisasian sebesar 58,28% (Cukup Berhasil), karena masih adanya petugas yang minim dengan tugasnya masing-masing.
3. *Actuating* (Pengarahan) Berdasarkan hasil jawaban responden masyarakat mengenai indikator pengarahan sebesar 50,63% (Cukup Berhasil), karena kurangnya ketegasan untuk menegur/memberi sanksi terhadap petugas yang lalai dalam menjalankan tugasnya.
4. *Controlling* (Pengawasan) Berdasarkan hasil jawaban responden pedagang dan masyarakat mengenai indikator pengawasan adalah sebesar 44,08% (Cukup Berhasil), karena kurangnya pengawasan dari petugas wisata pantai terhadap wisatawan.

Wisata pantai Tenggayun jika dikelola dengan baik sangat menguntungkan bagi masyarakat setempat. Dimana wisata pantai Tenggayun terletak di jalan lintas Dumai-Sungai Pakning dan juga wisata pantai Tenggayun merupakan satu-satunya wisata pantai yang ada di tiga kecamatan yaitu kecamatan Bandar Laksamana letak wisata pantai Tenggayun itu sendiri, kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang akan penulis sampaikan sehubungan dengan Pengelolaan Wisata Pantai Oleh Badan Usaha Milik Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis, yaitu antar lain:

1. Bagi pemerintah desa Tenggayun, dalam hal ini yakni badan usaha milik desa Tenggayun sebagai pengelola wisata pantai Tenggayun seharusnya menambakan lagi wahana-wahana di wisata pantai Tenggayun.
2. Pemerintah desa harus selalu berupaya memperluas kawasan wisata pantai desa tenggayun agar pembangunan pantai desa tenggayun lebih baik lagi, dengan cara membeli lahan masyarakat yang ada disekitaran wisata pantai.
3. Diharapkan pemerintah desa Tenggayun meningkatkan anggaran bagi badan usaha milik desa Tenggayun, dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan yang ada di sekitaran wisata pantai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ni Luh Henny Andayani, S. ST.Par., M.par. 2014. *Manajemen Pemasaran Pariwisata*. Yogyakarta, Graha Ilmu
- Abdul, Halim. 2003. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta, Salemba Empat
- Afifudin, 2013. *Dasar – dasar Manajemen*. Bandung, Alfabeta
- Al-Hafis, Raden Imam. 2015. *Teori Kebijakan Publik* Pekanbaru. Marpoyan Tujuh
- Andrew, Colin Mac, Ichlasul Amal. 2003. *Hubungan Pusat Daerah Dalam Pembangunan*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Dunn, William N. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi Kedua*. Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Farid, Ali. 2000. *Teori dan Konsep Administrasi dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi*. Bandung, Rajawali Pers
- Jones, O Colin. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)* Jakarta, Rajawali Pers
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Ekonomi Pembangunan, Teori Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta, APP AMP YPKM, Edisi ketiga
- Ndaraha, Talliziduhu. 2003. *Kybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru I*. Jakarta, Rineke Cipta
- Siagain, Sondang P. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta, Bumi Aksara
- Siswanto, B. 2005. *Pengantar Manajemen*. Bandung, Bumi Aksara
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Adminitrasi Negara*. Bandung, Bumi Aksara
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jatinangor, Erlangga
- Soekanto, Soerjono dan Sulistyowati. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Rajawali Pers
- Sugiono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta

Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung, PT. Refika Aditama

Tim Penyusun Edisi Revisi. 2013. *Buku Pedoman Penulisan* Badan Penerbit FISIPOL PEKANBARU : UIR

Wicaksono, Kristian Widya. 2014. *Telaah kritis Administrasi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia*. Bandung, Gava Media.

Dokumen:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2008 tentang *Pedoman Susunan Pengorganisasian dan Tata Kerja Pemerintahan Desa*

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 70 Tahun 2012 tentang *Tugas Pokok dan Fungsi Serta Rincian Tugas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan OlahRaga*

Peraturan desa Tenggayun Tahun 2015 tentang *Tatacara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tenggayun Sejahtera Desa Tenggayun*

Data Objek Wisata di Kabupaten Bengkalis

Surat perjanjian kerja pemerintah kabupaten bengkalis dinas perikanan dan kelautan